

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini seluruh data yang telah didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pelaksana kebijakan atau program serta sasaran kebijakan, studi kepustakaan, dan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang. Pembahasan fenomena-fenomena implementasi sebagai berikut :

4.1. Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang

4.1.1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan program TMMD di Kota Semarang dilihat dari isi dari program tersebut dan rumusan dari program tersebut apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tujuan dari program TMMD secara garis besar adalah membangun desa yang tertinggal dan membangun kembali rasa gotong royong di Kota Semarang sehingga masyarakat atau daerah yang menjadi sasaran program TMMD di Kota Semarang dapat menjadi sejahtera.

a. Isi Kebijakan

Isi kebijakan berkaitan erat dengan apa yang akan di kerjakan oleh kebijakan tersebut. Seperti program TMMD di Kota Semarang, program kerjasama antara pemerintah dan TNI untuk mensejahterakan masyarakat karena Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, sehingga desa merupakan pertahanan terakhir dalam bela negara. Selain itu, desa juga memiliki potensi alam yang besar (Setyowati : 2015) dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah tertuang pada bab sebelumnya isi dari program TMMD di Kota Semarang dibagi menjadi dua tahap yaitu reguler dan sengkuyung. Program TMMD reguler adalah program TMMD yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, sedangkan program TMMD sengkuyung yaitu program TMMD yang dilaksanakan didaerah khususnya di Jawa Tengah. Kegiatan yang ada di Program TMMD meliputi kegiatan fisik dan non fisik yang mempunyai persentase sebanyak 75% kegiatan fisik dan 25% kegiatan non fisik. Kegiatan fisik mencakup rehab rumah yang tidak layak huni, pengaspalan jalan, rehab mushola dan lain sebagainya, sedangkan program non fisik mencakup penyuluhan bahaya demam berdarah, wawasan kebangsaan, pelatihan kelompok tani, dan lain sebagainya. Dari kegiatan – kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah atau lokasi sasaran dari program TMMD.

Disisi lain pelaksanaan program TMMD selama 1 tahun terdiri dari 3 program TMMD yaitu Reguler, Sengkuyung tahap I, dan Sengkuyung Tahap II. Barulah pada tahun 2017 ditambah menjadi Sengkuyung tahap III, selama satu tahun

pemerintah Kota Semarang dan Kodim BS/Semarang melaksanakan program tersebut dalam satu tahun menjadi 4 kali. Tetapi masih banyak masyarakat yang menaruh harapan pada program TMMD agar daerah dan masyarakatnya disejahterkan, hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari pihak Kodim BS/Semarang yang belum terpenuhinya 100% harapan dari masyarakat karena pada saat pengajuan bantuan tidak diusulkan. Dari pihak Sekertariat daerah juga merasa jika harapan dari masyarakat yang terlalu tinggi tetapi apa yang di kerjakan pemerintah Kota Semarang dan Kodim sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam hal ini adalah sesuai dengan Rencana Umum Program TMMD Kota Semarang. Dari pihak masyarakat menilai jika isi dari program TMMD juga sudah cukup baik tetapi masih baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik, tetapi masih terdapat masalah seperti lamanya pengerjaan rehab rumah tidak layak huni dikarenakan tidak ada masyarakat yang membantu dalam mengerjakan rumah tersebut dan kurangnya dana untuk merehab rumah sehingga masyarakat mengeluarkan uang pribadi agar rumah tersebut dapat dihuni.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program TMMD berisi kegiatan fisik dan non fisik sehingga dapat mensejahterkan daerah dan masyarakat yang menjadi sasaran program TMMD dan membentuk kembali kemanunggalan antara masyarakat dengan TNI, tetapi di sisi lain harapan masyarakat yang tinggi untuk disejahterkan secara keseluruhan menjadikan isi dari program tersebut belum berjalan secara optimal.

b. Rumusan Kebijakan

Pada penelitian ini, rumusan kebijakan berkaitan erat dengan sejauh mana kesesuaian antara rumusan dan karakteristik permasalahan yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan terutama kemiskinan yang ada. Pemerintah Kota Semarang yang di wakili oleh Bappeda Kota Semarang menyatakan bahwa rumusan program TMMD sudah sesuai dengan masalah yang ada itu merujuk dari *database* warga miskin di Kota Semarang, tetapi disisi lain untuk program TMMD tidak dapat mencakup secara keseluruhan warga miskin. Observasi untuk kegiatan rehab rumah tidak layak huni di setiap kelurahan mendapatkan sekitar 10 unit sedangkan untuk membutuhkan bantuan tersebut lebih dari jumlah tersebut. Rehab rumah tidak layak huni hanya diberikan 10jt untuk satu rumah sehingga untuk merehab rumah secara keseluruhan tidak maksimal, maka dari itu perlunya sikap masyarakat sekitar untuk membantu warga yang kurang mampu agar rumah milik warga yang kurang mampu dapat ditinggali dengan layak.

Gambar 4.1 Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Patemon

Kecamatan Gunung Pati (dokumentasi 15 Oktober 2017)



Berdasarkan gambar diatas merupakan hasil rehab rumah tidak layak huni, untuk kegiatan rehab rumah diberi anggaran 10 juta untuk setiap rumah sumber dana tersebut berasal dari hibah Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dan kegiatan tersebut di laksanakan oleh Kodim BS/Semarang.

Secara garis besar karakteristik kemiskinan dalam program TMMD di Kota Semarang menurut pihak Sekertariat Daerah Kota Semarang bahwa kegiatan fisik untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah tersebut, sedangkan untuk program non fisik untuk lebih mengembangkan lagi potensi dari daerah yang menjadi sasaran dari program TMMD.

Bedasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa program TMMD di Kota Semarang dinilai belum tepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbatasnya

kuantitas bantuan untuk kegiatan program TMMD membuat percepatan pengentasan kemiskinan sedikit terhambat, selain itu banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat. Tetapi disisi lain isi dari program TMMD yang terdiri dari kegiatan fisik dan non fisik untuk mensejahterakan masyarakat selain itu pemerintah merumuskan hal tersebut melihat dari data warga miskin yang ada di Kota Semarang

4.1.2 Ketepatan Pelaksanaan

Aktor dalam pelaksana kebijakan tidak hanya pemerintah saja, namun juga dapat dilaksanakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat maupun swasta. Dalam ketepatan pelaksanaan dilihat dari aktor yang berperan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketepatan aktor pelaksana erat kaitannya dengan tepatnya aktor pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya untuk mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan program TNI Manuggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang, yang menjadi aktor adalah pemerintah, TNI, dan masyarakat. Peran dari pemerintah dan TNI dilihat dari sejauh mana melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan masyarakat dilihat dari sejauh mana membantu mendukung pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang.

a. Peran Sekretariat Daerah

Aktor pelaksana dalam program TMMD yang pertama adalah Sekertariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan. Dalam program TMMD di Kota Semarang

Sekretariat Daerah mewakili pemerintah Kota Semarang menggantikan peran dari Bapermas KB setelah adanya SOTK pada bulan Januari 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dideskripsikan bahwa peran dari Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan sebagai pelaksana dan perencana dalam program TMMD. Selain itu, dalam mengambil keputusan pihak Sekretariat Daerah tidak serta merta langsung mengambil keputusan tetapi harus melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait program TMMD. Sekretariat Daerah mewakili pihak pemerintah Kota Semarang ditunjuk langsung oleh Walikota untuk semua keputusan untuk pelaksanaan program TMMD diserahkan kepada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan.

b. Peran Kodim 0733 BS/Semarang

Aktor selanjutnya dalam pelaksanaan program TMMD adalah Kodim 0733 BS/Semarang yang mewakili pihak TNI. Pada dasarnya dalam pelaksanaan program TMMD Kodim merupakan elemen terpenting sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran Kodim dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang yaitu sebagai pelaksana teknis dilapangan bersama dengan masyarakat sehingga dapat membentuk kemandirian bersama masyarakat yang menjadi sasaran program TMMD. Selain itu dalam mengambil keputusan pihak Kodim BS/Semarang tidak serta merta mengambil keputusan terutama mengenai anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Semarang untuk program TMMD

Sengkuyung. Sedangkan untuk program TMMD reguler pihak Kodim ikut serta dalam mengambil keputusan dikarenakan ada anggaran dan laporan pertanggungjawaban untuk Kesatuan Angkatan Darat.

Dapat disimpulkan bahwa Kodim BS/Semarang mempunyai peran yaitu sebagai pelaksana teknis program TMMD selain pelaksana teknis Kodim juga mempunyai tanggungjawab untuk mengambil keputusan untuk pelaksanaan program TMMD reguler sedangkan untuk program TMMD sengkuyung diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang.

c. Peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang selain menunjuk Sekertariat Daerah untuk melaksanakan program TMMD, pemerintah juga menunjuk Bappeda Kota Semarang untuk membantu Sekertariat Daerah untuk melaksanakan program TMMD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, peran dari Bappeda Kota Semarang adalah sebagai perencana dan penganggaran untuk pelaksanaan program TMMD kemudian berdasarkan observasi peneliti selain sebagai perencana dan penganggaran Bappeda Kota Semarang juga sebagai Koordinator pihak – pihak yang terkait program TMMD, setiap mengadakan rapat koordinasi antara para pelaksana ataupun perencana program TMMD selalu bertempat di Bappeda. Dalam mengambil keputusan Bappeda juga mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai perencana dan penganggaran apa saja kegiatan yang telah direncanakan dalam program TMMD tanpa persetujuan Bappeda kegiatan tersebut tidak dapat

berjalan, selain itu Bappeda juga diikutkan survey lapangan untuk kegiatan rehab rumah tidak layak huni.

d. Peran Kecamatan

Selain Sekertariat Daerah dan Bappeda aktor lain dalam implementasi program TMMD di Kota Semarang adalah Kecamatan. Seperti Sekertariat Daerah dan Bappeda, Kecamatan juga mempunyai peranan tersendiri dalam melaksanakan program TMMD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Kecamatan mempunyai peranan sebagai koordinator antara pelaksana program dengan kelurahan sebagai sasaran program TMMD, selain itu dalam mengambil keputusan Kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait program TMMD.

e. Peran Masyarakat

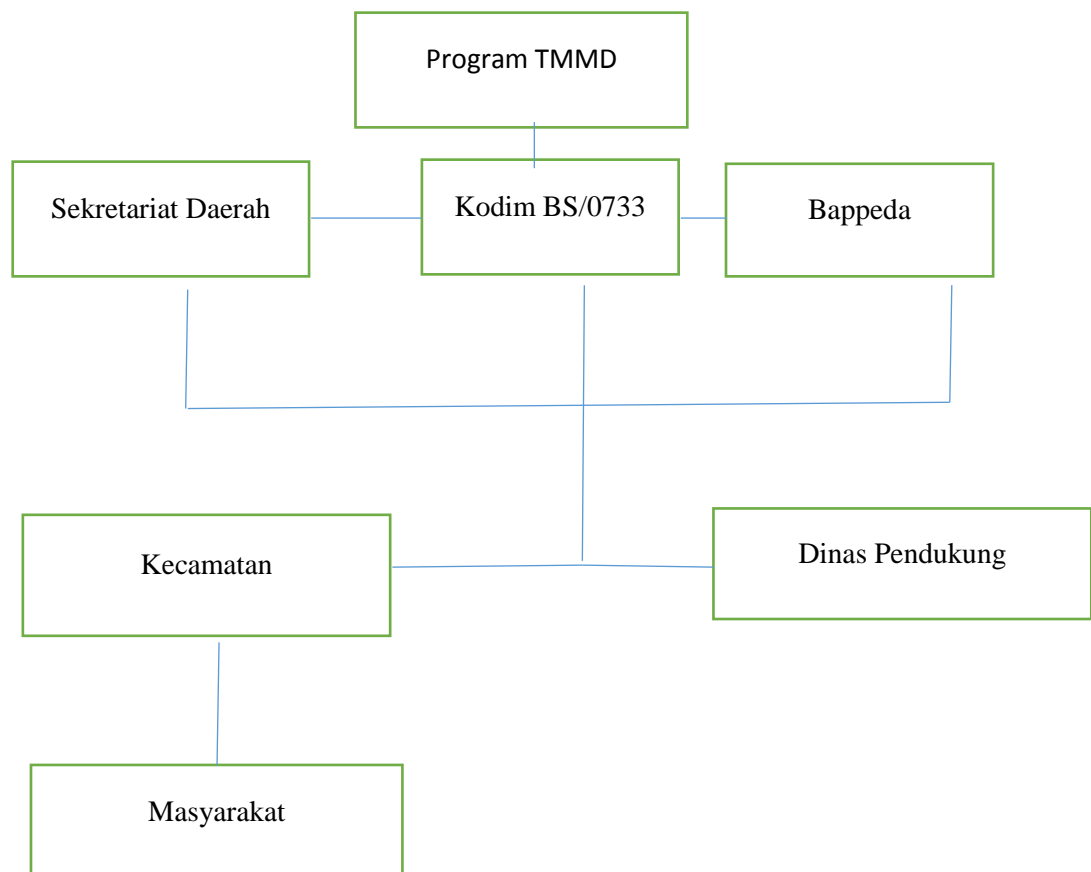
Masyarakat juga merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, peran masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal ini juga terjadi dalam implementasi program TMMD di Kota Semarang, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa masyarakat merupakan sasaran dari implementasi program TMMD, selain sebagai sasaran program masyarakat dituntut berperan aktif untuk ikut membantu pelaksanaan program TMMD. Dalam penelitian ini, masyarakat di kelurahan patemon dan kelurahan pakintelan sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan program

TMMD. Bentuk keterlibatan masyarakat berupa ikut membantu gotong royong dengan TNI untuk melaksanakan berbagai kegiatan fisik, selain ikut gotong royong masyarakat juga membantu menyiapkan makanan untuk anggota TNI dan masyarakat yang sedang bergotong royong melaksanakan kegiatan fisik.

Disisi lain ada beberapa masyarakat yang kurang berperan aktif ikut membantu pelaksanaan program TMMD dikarenakan harus bekerja mencari nafkah, pada saat hari liburpun hanya beberapa orang saja yang ikut membantu melaksanakan program TMMD. Dengan kurangnya partisipasi dari masyarakat bukan tidak mungkin dapat menghambat pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Dari penjelasan tentang ketepatan pelaksanaan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Struktur Program TMMD di Kota Semarang



Sumber : Hasil Observasi

Gambar di atas dapat disimpulkan, struktur program TMMD di Kota Semarang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Kodim dan Bappeda sebagai perencana dan pelaksana program TMMD. Sedangkan dinas pendukung dan Kecamatan ikut berpartisipasi melancarkan pelaksanaan dan ikut berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah, Kodim, dan Bappeda. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan pelaksana program TMMD.

Berdasarkan deskripsi di atas, disimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan cukup sesuai bahwa implementasi program TMMD di Kota Semarang dilaksanakan oleh Kodim BS/Semarang yang dibantu oleh Sekretariat Daerah, Bappeda, Kecamatan, dan masyarakat. Dalam implementasi program TMMD di Kota Semarang, semua aktor mempunyai tugas dan fungsi sendiri – sendiri, tetapi sangat disayangkan kurangnya peran aktif dari masyarakat untuk membantu melaksanakan program TMMD membuat pelaksanaan program TMMD akan terhambat.

4.1.3 Ketepatan Target

Ketepatan target berkaitan erat dengan sasaran dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut, kriteria dari sasaran kebijakan dan tanggapan dari masyarakat. Ketepatan target dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilihat dari sasaran program, kriteria sasaran program, dan tanggapan dari masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai ketepatan target yang pertama adalah sasaran dari program TMMD, menurut hasil wawancara

selama pelaksanaan program sudah tepat sasaran hal ini didukung dengan aktifnya pihak – pihak program TMMD dalam berkoordinasi serta perencanaan yang baik. Yang kedua yaitu kriteria sasaran dari program TMMD yaitu masyarakat yang kurang mampu dan masuk data base masyarakat miskin, sebelum melaksanakan program TMMD pihak – pihak yang terkait melakukan survey untuk memastikan warga tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga adalah tanggapan dari masyarakat mengenai adanya program TMMD menurut hasil wawancara peneliti menunjukan respon berbeda – beda dari masyarakat tetapi secara garis besar dengan adanya program TMMD masyarakat menerima program tersebut karena program tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Menurut Chamhuri (2012) sejumlah kategori individu, rumah tangga, dan kelompok sosial yang sangat mungkin menderita kemiskinan perkotaan salah satunya adalah orang yang tinggal di daerah pedesaan terpencil yang ada di daerah perkotaan. Sehingga program TMMD dapat mendukung pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Semarang.

Fenomena ketepatan target dapat disimpulkan bahwa program TMMD sudah tepat target. Dapat dilihat dari sasaran kebijakan, dalam pelaksanaannya program TMMD sudah tepat sasaran. Kriteria dari sasaran program adalah masyarakat yang kurang mampu ditambah tanggapan yang bagus dari masyarakat.

4.1.4 Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini dilihat dari pertama, adalah lingkungan endogen kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan

eksogen kebijakan, dengan melihat interaksi antara lembaga pelaksana kebijakan dengan media masa. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai lingkungan endogen dan lingkungan eksogen yang berhubungan dengan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang.

a. Lingkungan Endogen

Lingkungan endogen (internal) kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang merupakan pembaruan dari kebijakan ABRI Masuk Desa (AMD) yang dulu pernah dilaksanakan pada saat era orde baru.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti, dalam pelaksanaan program TMMD ada instansi lain untuk mendukung program TMMD seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pelaksanaan kegiatan rehab rumah tidak layak huni, PDAM untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan saluran air, Dinas Perhubungan untuk pelaksanaan kegiatan pengaspalan jalan, dan Dinas Pertanian untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi mengenai potensi pertanian serta masih banyak instansi lain.

Interaksi dan hubungan antara perumus kebijakan dan pelaksana dalam program TMMD menurut hasil wawancara dari pihak Sekertariat Daerah dan Bappeda Kota Semarang interaksi dan hubungan antar perumus dan pelaksana kebijakan berjalan baik dan bagus mereka melaksanakan program TMMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing, hal ini dikarenakan seringkali pihak – pihak terkait program TMMD sering melakukan rapat koordinasi.

b. Lingkungan Eksogen

Selain lingkungan endogen terdapat pula interaksi dengan lingkungan eksogen (eksternal) seperti media massa. Media massa memiliki peran dalam menyediakan informasi. Sehingga dalam pelaksanaan program TMMD masyarakat dapat mengetahui informasi melalui media massa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dideskripsikan bahwa pihak media massa baik media cetak maupun media elektronik memberikan respon positif untuk pelaksanaan program TMMD, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya program tersebut membantu masyarakat yang kurang mampu. Peran dari media massa dalam program TMMD berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program tersebut.

Fenomena ketepatan lingkungan dari segi lingkungan endogen sudah tepat, hal ini terlihat dari banyaknya instansi yang ikut mendukung pelaksanaan program TMMD, selain itu perumus dan pelaksana program sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya masing – masing, karena didukung dengan seringnya mereka melakukan rapat koordinasi. Dari segi lingkungan eksogen sudah tepat karena pelaksanaan program TMMD mendapatkan respon yang cukup positif dari media massa baik media cetak maupun media elektronik.

4.1.5 Ketepatan Proses

Ketepatan proses dilihat dari penerimaan masyarakat serta kesiapan dari pihak – pihak terkait untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka menerima, memahami, dan siap menjadi bagian dari pelaksanaan program TMMD.

a. Penerimaan Masyarakat

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam menerima suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, masyarakat seharusnya memberikan respon yang positif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Kota Semarang menerima kebijakan ini. Menurut Aneta (2010) keberterimaan masyarakat dapat dilihat melalui seberapa jauh pemahaman dan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam program implementasi kebijakan, perspektif ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui, memahami dan mendukung serta berpartisipasi langsung terhadap pelaksanaan berbagai tahapan dan bentuk program TMMD di Kota Semarang. Menurut Purwatiningsih (2013) terkait dengan sasaran pelaksanaan program TMMD adalah masyarakat yang ada di sekitar lokasi, maka tingkat efektifitas implementasi program dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat yang sekaligus merupakan salah satu pihak pemangku kepentingan dalam program TMMD.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa ada masyarakat yang menerima secara positif atas pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan dengan masyarakat yang menerima bantuan ikut membantu dalam melaksanakan kegiatan program TMMD, seperti informan 6 selaku masyarakat di Kelurahan Pakintelan yang mendapat bantuan dari program TMMD ikut membantu pengerjaan kegiatan rehab rumah tidak layak huni. Hal ini merupakan bentuk dukungan positif yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Tetapi disisi negatif

masih ada masyarakat yang acuh dengan adanya program TMMD. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari program TMMD tidak merasa bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang mendapat bantuan dan ikut berpartisipasi melaksanakan program TMMD.

b. Kesiapan Pelaksana

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dalam kesiapannya sebagai aktor implementasi program TMMD di Kota Semarang. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesiapan dari pihak – pihak terkait dalam rangka melaksanakan program TMMD di Kota Semarang ini. Hal ini dibuktikan dengan persiapan yang dilakukan setahun sebelum pelaksanaan program TMMD.

Fenomena ketepatan target dalam Implementasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang dinilai belum tepat proses. Hal ini dikarenakan dari kesiapan masyarakat yang belum seluruhnya siap untuk ikut membantu dan berpartisipasi aktif membantu pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi program TMMD di Kota Semarang menggunakan lima ketepatan Rian Nugroho, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program TMMD mempunyai kelebihan pada ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Tetapi disisi lain program TMMD mempunyai kekurangan pada ketepatan kebijakan dan ketepatan proses dikarenakan sedikitnya partisipasi dari masyarakat.

4.2 Faktor – Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kota Semarang

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi publik atau masyarakat dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian dari komunikasi sendiri ialah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Fenomena komunikasi yang dilihat sebagai berikut: transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang.

a. Transmisi

Transmisi sangat erat berkaitan dengan pemerintah menyalurkan perintah yang telah dibuat, sehingga pemerintah dapat melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa transmisi yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait program TMMD untuk menyampaikan informasi melalui rapat koordinasi, penyaluran informasi melalui rapat koordinasi mampu diterima oleh pelaksana program TMMD. Menurut informan 2 ketika dalam keadaan mendesak penyaluran informasi dilakukan melalui pesan singkat seperti sms dan Whats app. Untuk penyaluran informasi kepada masyarakat, pelaksana program

menyalurkan informasi melalui upacara pembukaan program TMMD. Penyaluran informasi kepada masyarakat berisi kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada program TMMD di daerah tersebut. Transmisi dalam program TMMD kerap dilakukan oleh pelaksana maupun perumus program melalui rapat koordinasi, informasi yang diberikan dapat berupa lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan sampai sasaran dari program TMMD.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi menghindari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan, jika pelaksana kebijakan tidak dapat menerima informasi karena tidak ada kejelasan dari informasi tersebut bukan tidak mungkin dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara, kejelasan informasi program TMMD sudah baik hal ini dibuktikan dengan semua pihak – pihak yang terkait program TMMD dapat mengerti tentang informasi yang telah diberikan, menurut para informan hal tersebut karena mereka sering melakukan rapat koordinasi sehingga informasi tersebut jelas dan dapat dipahami oleh pihak – pihak terkait program TMMD. Masyarakat sebagai sasaran program dapat menerima informasi dengan jelas, baik itu mengenai bentuk bantuan ataupun waktu dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kejelasan informasi dalam pelaksanaan program TMMD sudah jelas dan dapat diterima oleh pihak – pihak terkait maupun masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara pelaksana program, perumus program, maupun masyarakat selaku sasaran dari program TMMD.

c. Konsistensi

Konsistensi informasi dalam melaksanakan program TMMD agar informasi yang diberikan tidak berubah – ubah dan dapat diterima oleh pihak – pihak terkait program TMMD. Berubah –ubahnya informasi dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program TMMD.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, konsistensi dari informasi yang diberikan untuk pelaksanaan program TMMD sudah konsisten hal ini dibuktikan dari wawancara dengan informan 1 yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan sudah konsisten, dengan adanya rapat koordinasi menghindari informasi berubah – ubah. Pernyataan ini diperkuat oleh informan 2 yang menyatakan informasi mengenai program TMMD sudah konsisten hal ini dikarenakan pelaksanaan program TMMD sudah dilaksanakan sejak dahulu menjadikan informasi tersebut sudah konsisten.

Konsistensi dari pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik hal ini didukung dengan rutinnnya pihak – pihak yang terkait melakukan rapat koordinasi dan pelaksanaan dari program TMMD sudah berjalan sejak bernama ABRI Masuk Desa (AMD) hingga saat ini.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena komunikasi dapat menjadi faktor pendorong pelaksanaan program TMMD. Hal ini dapat dibuktikan dari transmisi informasi yang sudah baik, kejelasan informasi yang sudah baik, dan konsistensi informasi yang sudah baik.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber daya tidak tersedia maka pelaksanaan dari sebuah kebijakan dapat terhambat. Dalam fenomena sumber daya yang diteliti adalah Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan program TMMD dan Sumber Daya Finansial untuk mencukupi pelaksanaan program TMMD.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dibagi menjadi kuantitas dan kualitas pegawai. Dengan kuantitas pegawai yang cukup dapat mengurangi beban yang diberikan kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaan, namun kuantitas pegawai juga harus dibarengi dengan kualitas pegawai yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, sumber daya manusia untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang dirasa sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan oleh pernyataan informan 2 yang mewakili Kodim BS/Semarang merasa jumlah personel untuk melaksanakan program TMMD masih kurang, dikarenakan tentara harus siap jika dibutuhkan oleh atasan ketika ada keadaan mendesak seperti kejahatan atau bencana alam tentara dituntut untuk sigap dalam memberikan bantuan saat masyarakat membutuhkan bantuan. Sedangkan untuk kualitas pegawai sendiri cukup baik karena setiap tentara tidak hanya dibekali ilmu tentang perang tetapi juga ilmu diluar perang seperti tukang guna melaksanakan program TMMD terutama untuk kegiatan fisik. Hal serupa juga disampaikan oleh informan 1 yang mewakili Sekertariat Daerah Kota Semarang bahwa kuantitas

pegawai untuk melaksanakan program TMMD masih kurang karena bertambahnya beban kerja pegawai yang dulunya program TMMD dipegang oleh Bapermas KB sekarang dilimpahkan ke Sekertariat Daerah Kota Semarang Bagian Tata Pemerintahan. Untuk kualitas pegawai sendiri sudah cukup baik semua pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Informan 3 yang mewakili Bappeda Kota Semarang juga menyampaikan hal yang sama bahwa pegawai untuk melaksanakan program TMMD sangatlah terbatas. Sedangkan kualitas pegawai sudah cukup baik dapat dilihat dari riwayat pendidikan pegawai Bappeda yang bergelar sarjana.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas pegawai yang digunakan dalam mendukung program TMMD, masih dinilai kurang baik dibuktikan dari beban kerja yang lebih berat tetapi tidak diimbangi dengan pegawai yang cukup. Kemudian untuk kualitas pegawai dinilai cukup baik, tetapi jika kualitas pegawai tidak ditunjang dengan kuantitas pegawai yang memadai maka pelaksanaan program TMMD akan terhambat.

b. Fasilitas

Dalam pelaksanaan implementasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang memerlukan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Kurangnya fasilitas yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa, sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program TMMD di lingkungan internal

sudah cukup memadai. Fasilitas komputer, ruangan serta AC untuk rapat koordinasi maupun membuat laporan pertanggung jawaban program dirasa sudah cukup menunjang untuk melaksanakan program TMMD. Namun disisi lain terdapat kendala pada ketersediaan alat – alat untuk melaksanakan kegiatan fisik yang terkesan seadanya.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang dilingkungan internal sudah cukup baik, tetapi untuk menunjang kegiatan fisik masih mengalami kendala pada alat – alat yang seadanya sehingga fasilitas untuk melaksanakan program TMMD masih belum optimal.

c. Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting bagi implementasi program TNI Manunggal membangun Desa (TMMD). Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Para pelaksana mempunyai wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan, namun terdapat batasan-batasan juga dalam penggunaan wewenangnya.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, kewenangan yang dilaksanakan diprogram TMMD hanya berupa pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing instansi, selain itu para pelaksana program TMMD kurang tegas dalam mengajak instansi perangkat daerah lain dan masyarakat untuk berpartisipasi diprogram TMMD. Dapat disimpulkan bahwa Kodim dan pemerintah Kota Semarang mempunyai wewenang dalam melaksanakan program TMMD di Kota Semarang termasuk mengajak masyarakat dan dinas – dinas untuk

membantu pelaksanaan program TMMD tetapi pada kenyataannya kodim dan pemerintah kurang tegas untuk mengajak masyarakat maupun organisasi perangkat daerah di Kota Semarang untuk berpartisipasi melaksanakan program TMMD.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena sumberdaya menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program TMM di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia, kurangnya fasilitas untuk melaksanakan program TMMD, serta masih belum tegasnya baik kodim maupun pemerintah untuk memberi teguran kepada masyarakat maupu dinas – dinas pendukung program TMMD.

4.2.3 Disposisi

Disposisi berkaitan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan atau implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi tidak berjalan efektif. Komitmen dan sikap kejujuran sebagai bentuk disposisi pelaksana kebijakan ini . Komitmen merupakan kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Sedangkan kejujuran dapat mengarahkan pelaksana kebijakan untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, disposisi implementor dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang mengenai komitmen yang dilakukan oleh implementor dapat dilihat dari adanya upaya dari pemerintah Kota

Semarang dan Kodim untuk melaksanakan program TMMD secara sungguh – sungguh agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya cara menumbuhkan sikap kejujuran yaitu dengan melakukan pengawasan dari penganggaran sampai pelaksanaan agar implementor melaksanakan program TMMD sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, selain itu Kodim mempunyai cara tersendiri untuk menumbuhkan sikap kejujuran dengan memberi motivasi langsung dari Dandim kepada tentara yang akan melaksanakan program TMMD dilapangan.

Fenomena disposisi menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan komitmen dari pemerintah maupun TNI untuk bersama – sama melaksanakan program TMMD agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu pemerintah dan TNI punya cara tersendiri agar implementor tetap melaksanakan program TMMD secara jujur.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dilihat dari ketersediaan Standart Operating Procedur (SOP) dan juga pelaksana kebijakan memahami mengenai dengan Standart Operating Procedur (SOP) tersebut secara mendalam. SOP merupakan pedoman untuk implementor dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dideskripsikan bahwa SOP untuk pelaksanaan program TMMD hanya dimengerti oleh pihak Kodim, karena SOP tersebut berasal dari Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KASAD) selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) melalui buku tata cara pelaksanaan program

TMMD. Secara garis besar buku tersebut berisi tahap perencanaan, survey sasaran, koordinasi dengan pemerintah Kota atau Kabupaten, persiapan material, dan persiapan prajurit guna pelaksanaan dilapangan serta menjaga keamanan dilapangan. Tetapi disisi lain pihak pemerintah belum mengerti tentang adanya SOP tersebut hal tersebut diungkapkan oleh informan 1 selaku Sekertariat Daerah Kota Semarang Bagian Tata Pemerintahan, bahwa SOP tertulis untuk melaksanakan program TMMD tidak ada, selama pelaksanaan program TMMD pemerintah tidak ada SOP secara tertulis.

Fenomena struktur birokrasi dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya SOP yang diberikan langsung oleh KASAD selaku PJO program TMMD yang berisikan tata cara pelaksanaan program TMMD. Tetapi disisi lain yang menjadi faktor penghambat pihak pemerintah selama melaksanakan program tersebut tidak mengetahui adanya SOP tertulis hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan program TMMD.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi program TMMD di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dan disposisi merupakan faktor pendorong pelaksanaan program TMMD. Sedangkan faktor sumber daya dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat program TMMD, karena kurangnya sumber daya manusia serta tidak adanya SOP dari pihak pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program TMMD.